

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini sebagai makhluk yang paling sempurna. Salah satu buktinya bahwa manusia diberikan cipta, rasa, karya dan karsa. Oleh karena itu, tidaklah heran ketika manusia mampu mengembangkan pola pikirnya untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih maju lagi. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan tidak bersifat individu melainkan manusia sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama dengan orang lain serta sering membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Keinginan mengembangkan keturunan adalah naluri setiap manusia. Untuk kepentingan itu manusia perlu melakukan pernikahan. Dari pernikahan tersebut terjalinlah sebuah ikatan suami isteri yang pada gilirannya terbentuk sebuah keluarga berikut keturunannya berupa anak-anak. Dengan demikian kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, juga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia.

Oleh karenanya, rasanya kurang lengkaplah sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak. Bahkan, dalam kasus tertentu tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami istri.

Akan tetapi, karena berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai. Dalam keadaan demikian berbagai perasaan dan pikiran akan timbul dan pada tataran tertentu tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan. Kecemasan tersebut, selanjutnya diekspresikan oleh salah satu pihak atau kedua pihak, suami istri, dalam bentuk tindakan-tindakan tertentu. Salah satu tindakan suami istri, ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara natural adalah dengan cara mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya, anak tersebut dimasukkan ke dalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai adopsi yang dalam tulisan ini penulis sebut sebagai pengangkatan anak.

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-

masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Pengangkatan anak yang ada di Indonesia sekarang, memang telah dimulai sejak lama. Dalam masyarakat yang memiliki adat tertentu, telah lama dijumpai praktek pengangkatan anak ini. Hanya saja, motivasi dan cara serta akibat pengangkatan anak tersebut berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui Lembaga Peradilan Agama, maka sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomer 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam¹. Pada pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuanya berdasarkan putusan pengadilan”.²

Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika dibandingkan dengan definisi anak angkat dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan

¹ Hj. Siti Syamsiah, Hakim Pengadilan Agama Klaten, *wawancara pribadi*, 15 April 2011, 13.00.

² Pasal 171 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.³

Hal penting yang harus digaris bawahi adalah bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, selama ini telah menangani perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang-orang Islam berdasarkan hukum Islam, hanya

³ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

berdasarkan desakan dan kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat muslim itu sendiri.

Dalam sejarah Islam Pengangkatan Anak dalam konsep Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 yang memiliki unsur-unsur dan akibat hukum yang sama dengan praktik pengangkatan anak dalam masyarakat jahiliyah tersebut, telah dibatalkan oleh Allah SWT. Melalui surat al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang artinya sebagai berikut :

“Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah SWT mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah SWT, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maula-mu “.

Dalam konteks ini, pengangkatan anak dalam semangat nilai-nilai ta’awun, kemaslahatan, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tetap menjadi bagian yang dianjurkan bahwa diwajibkan oleh Islam.

Pengadilan Agama terikat dengan suatu asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa *“Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.⁴ Oleh karena itu, *“hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup*

⁴ Pasal 16 ayat (1) Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

dalam masyarakat”,⁵ pengangkatan anak dalam konteks ta’awun dan semangat pelurusan hukum sesuai asas komitmen akidah sebagian besar bangsa Indonesia sebagai salah satu unsur nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu poin penting yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara permohonan pengangkatan anak.

Mahmud Syaltut menyatakan bahwa pengangkatan anak dalam konteks mengangkat anak orang lain yang diperlakukan seperti memperlakukan anak sendiri dalam hal kasih sayang, nafkah sehari-hari, pendidikan dan lain-lain, tanpa harus menyamakan sebagai anak kandung, maka pengangkatan anak seperti ini dalam Islam dibenarkan.⁶

Tujuan atau motif dari pengangkatan anak untuk orang yang satu dengan yang lain juga saling berbeda, ada keinginan mengangkat anak sebagai upaya mendapatkan keturunan, ada juga rasa belas kasihan pada anak angkat apabila terus hidup dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak menurut hukum adat sering dikenal sebagai usaha mengambil anak bukan keturunan sendiri dengan maksud untuk dipelihara dan diperlakukan seperti anak kandung sendiri yang membawa serta hak dan kewajiban anak angkat dalam kehidupan sehari-hari juga dalam hal pewarisan.

⁵ Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶ Mahmud Syaltut, *al-Fatwa*, dalam Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2007, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta:Pena Media

Perkawinan adalah sebagai dasar utama untuk mendapatkan seorang anak yang sah sebagai kelanjutan keturunannya. Akan tetapi haruslah diingat pula bahwa tujuan utama dari suatu perkawinan bukanlah semata-mata untuk mendapatkan keturunan, tetapi tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Walaupun adanya keturunan atau anak bukan sebagai tujuan utama dari suatu perkawinan, akan tetapi dengan tidak adanya anak maka perkawinan kurang sempurna. Maka dari itu satu-satunya jalan untuk memperoleh anak apabila selama perkawinan berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan keturunan adalah dengan mengangkat anak baik dari lingkungan keluarga sendiri atau dari lingkungan orang lain.

Oleh karena itu sehubungan dengan masalah tersebut di atas, maka penulis berkeinginan meneliti masalah pengangkatan anak. Adapun alasan penulis mengambil judul “PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLATEN)” adalah bahwa dalam perbuatan mengangkat anak merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat, karena dalam kehidupan perkawinan anak sebagai penerus keturunan.

Karena pengangkatan anak dewasa ini semakin sering dilakukan oleh masyarakat, maka penulis menaruh perhatian untuk mengadakan penelitian

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

masalah pengangkatan anak. Penulis juga tertarik untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengangkatan anak, khususnya di daerah Klaten.

Selain itu, Penulis memilih judul “PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLATEN)”, karena tempat tinggal penulis dekat dengan lokasi penelitian dan mudah untuk mendapatkan data-data tersebut sehingga dapat memperlancar jalannya penelitian.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi kerancuan dan untuk menghindari penyimpangan dari pokok permasalahan yang akan diteliti, maka penulis perlu membatasi permasalahan agar tidak terjadi meluasnya penafsiran. Oleh karena itu penulis hanya akan meneliti bagaimana Pengadilan Agama Klaten dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan Akibat apakah yang akan timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

C. Rumusan Masalah

Untuk mengembangkan keturunan merupakan naluri setiap manusia. Oleh karenanya, rasanya kurang lengkap apabila sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak. Bahkan dalam kasus tertentu tanpa kehadiran anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri dari pasangan suami

isteri. Di Indonesia saat ini, Pengangkatan Anak memang telah dimulai sejak lama. Hal ini mengingat adanya keinginan mengangkat anak sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan serta ada juga rasa belas kasihan pada anak angkat apabila terus hidup dengan orang tua kandungnya.

Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal.⁸

Berdasarkan uraian masalah tersebut di atas, maka yang akan dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Klaten?
2. Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan pengangkatan anak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan atau memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Klaten.

⁸ <http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2020002-pengertian-masalah>, diunduh Jum'at 15 Juli 2011 pukul 20.00:01

2. Untuk mengetahui secara jelas mengenai akibat hukum yang akan timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Dengan adanya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan adanya Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama.

E. Kerangka Pemikiran

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, anaklah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁹

⁹ Wagianti Soetedjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama. Hal. 10-11.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁰

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau

¹⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2007, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta:Pena Media, hal.1.

kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi yang sebenarnya.¹¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian yang diskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan suatu data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu dengan mempertegas hipotesa-hipotesa lama atau baru dalam rangka menyusun teori baru.¹² Alasan menggunakan penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang telah penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, Penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Klaten

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian (di Pengadilan Agama Klaten), metode yang dipakai adalah interview yaitu dengan cara mengadakan wawancara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam.

¹¹ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:UGM Press, 1991, hal 11

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indo Press, 1986, Hal 10

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yaitu buku dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

5. Cara pengumpulan Data

a. Interview

Interview merupakan cara memperoleh fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung dengan subyek penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan penjarangan data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek dan atau obyek penelitian secara seksama dan sistematis.

c. Studi Literatur

Studi Literatur merupakan cara mendapatkan data dengan jelas mempelajari dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang bersangkutan dengan obyek yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif yaitu suatu pendekatan dari cara pelitian yang menghasilkan deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

G. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah mencari laporan ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, di dalam tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Secara lengkap sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Orang tua dan Anak
 - 1. Devinisi dan Pengertian Orang tua
 - 2. Devinisi dan Pengertian Anak
- B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak
 - 1. Pengertian Pengangkatan Anak

2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak
 3. Alasan dan tujuan Pengangkatan Anak
 4. Hak dan Kewajiban Anak angkat
 5. Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi hukum Adat
 6. Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam
 7. Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum Perdata Barat
 8. Hukum Pengangkatan Anak
- C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pengangkatan Anak
1. Fungsi Lembaga Pengangkatan Anak dalam Masyarakat
 2. Kebutuhan Masyarakat Akan Lembaga Pengangkatan Anak
- D. Tinjauan Umum Tentang Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama
1. Kewenangan di Pengadilan Agama
 2. Permohonan Voluntair yang diajukan di Pengadilan Agama
 3. Pengesahan (*Itsbat*) Pengangkatan Anak

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian

1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Klaten
2. Akibat Hukum yang Akan Timbul Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Klaten
2. Akibat Hukum yang Akan Timbul Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Siti Hj. Syamsiah, Hakim Pengadilan Agama Klaten, *wawancara pribadi*, 15 April 2011, 13.00.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *tentang Kekuasaan Kehakiman*

Syaltut, Mahmud, 1991, *al-Fatwa*, dalam Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2007, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta:Pena

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

Soetedjo, Wagianti, 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Syamsu, Andi Alam dan M. Fauzan, 2007, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media,

Nawawi, Hadari, 1991. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : UGM

Soekanto, Soejono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indo